

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 13 TAHUN 2019  
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN CIPUTAT  
KOTA TANGERANG SELATAN**

**Astika Dwi Juliani, Nina Widowati, Maesaroh**

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas  
Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman : [www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

---

**ABSTRACT**

*The waste problem is one of the things that cannot be avoided in the lives of the people of South Tangerang City. The geographical area that borders the DKI Jakarta Province and low public awareness means that the number of waste problems in South Tangerang City is still low. South Tangerang City Government continues to make efforts to reduce waste problems through Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning Waste Management. It is hoped that the formation of this regulation will be able to increase the city's resilience in maintaining public health and turning waste into a resource as well as significantly reducing the volume of waste in South Tangerang City. This research aims to analyze the implementation of Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning Waste Management and analyze the driving and inhibiting factors in its implementation in Ciputat District, South Tangerang City. The research method used in this research is descriptive qualitative using primary data sources obtained through in-depth interviews and field observations as well as secondary data. In this study, researchers analyzed the implementation of Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning waste management through the phenomenon of policy content and policy environment. In this research, it was found that the process of implementing Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning waste management had been carried out with the problems faced by the South Tangerang City Government. The implementation of Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning waste management has also gone well although there are still obstacles regarding the implementation system. In implementing this program there are also driving factors, namely resources and bureaucratic structure, as well as inhibiting factors, namely communication and disposition.*

**Keywords: Implementation, Policy, Trash**

## ABSTRAK

Permasalahan sampah menjadi salah satu hal yang tidak bisa dihindari dari kehidupan masyarakat Kota Tangerang Selatan. Wilayah geografis yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta hingga rendahnya kesadaran masyarakat membuat angka permasalahan sampah Kota Tangerang Selatan masih rendah. Upaya pengurangan permasalahan sampah terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Pembentukan peraturan itu diharapkan mampu meningkatkan ketangguhan kota dalam menjaga kesehatan masyarakat dan menjadikan sampah sebagai sumber daya serta untuk mengurangi volume sampah secara signifikan di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaannya di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi di lapangan serta data sekunder. Pada penelitian ini peneliti menganalisis implementasi kebijakana Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah melalui fenomena isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Pada penelitian ini ditemukan sudah dilaksanakan proses implementasi kebijakan Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah dengan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Pelaksanaan dari Implementasi Kebijakan Perda Nomor 13 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah juga sudah berjalan dengan baik meskipun masih ada kendala mengenai sistem pelaksanaannya. Pada pelaksanaan progam ini juga terdapat faktor pendorong yakni sumber daya dan struktur birokrasi serta faktor penghambat yaitu komunikasi dan disposisi.

**Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Sampah**

## PENDAHULUAN

Sampah adalah persoalan umum yang sering terjadi di Indonesia. Penumpukan sampah yang terlalu banyak bisa menyebabkan permasalahan yang cukup serius bilamana tidak ditutaskan dengan tepat. Dampak dari penumpukan sampah yang tidak diurus dengan

tepat mampu mendatangkan berbagai masalah tidak pada lingkungan saja melainkan manusia pun bisa ikut merasakan dampaknya seperti munculnya berbagai penyakit dari bakteri atau virus yang disebabkan oleh sampah, menyebabkan terjadinya banjir, kerusakan ekologis, dan

tentunya menimbulkan bau yang tidak sedap. Penumpukan sampah yang terjadi di sebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang meningkat dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dikarenakan banyak masyarakat yang belum paham sepenuhnya terkait pentingnya menjaga lingkungan.

Mengenai pengelolaan sampah, pemerintah Kota Tangerang Selatan menerbitkan kebijakan pengelolaan sampah yakni Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013 berubah menjadi Peraturan Daerah No.13 Tahun 2019 yang berfungsi sebagai pengatur tentang pengelolaan sampah yang ada di Kota Tangerang Selatan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah memiliki kewajiban pada konteks pengelolaan sampah, yang mana Pemerintah Kota Tangerang Selatan melewati Dinas Lingkungan Hidup wajib mengupayakan terlaksananya pengelolaan sampah yang baik, yang tidak menimbulkan kerugian terhadap warga dan lingkungan sekitar. DPRD Kota Tangerang Selatan telah memberikan persetujuan atas rencana eksekutif untuk mengangkut ratusan

metrik ton sampah setiap harinya menuju Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Cilowong di wilayah Kota Serang, Banten. Namun, keputusan ini dipandang hanya sebagai solusi sementara yang tidak menyelesaikan permasalahan sampah secara mendasar, melainkan sekedar memindahkannya dari satu lokasi ke lokasi lain.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi di lapangan serta data sekunder. Situs penelitian ini berada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan dan UPT TPA Cipeucang. Subjek pada penelitian ini adalah Koordinator Dinas Lingkungan Hidup, Pegawai Kecamatan Ciputat, Masyarakat Kecamatan Ciputat, dan Pedagang pasar tradisional Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan.

## **Hasil dan Pembahasan**

Penelitian ini bermaksud guna menganalisis implementasi kebijakan Perda No.13 Tahun 2019 terkait pengelolaan sampah di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan dan menganalisis faktor pendorong beserta penghambat implementasi kebijakan Perda No.13 Tahun 2019 terkait pengelolaan sampah di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan penelitian ini peneliti mendapat data menggunakan data primer beserta data sekunder. Pembahasan pada penelitian ini berisikan fakta dan berdasarkan data yang didapatkan dari informan-informan menggunakan teori implementasi Merilee S. Grindle. Teori tersebut digunakan karena dapat dijadikan tolak ukur mengenai penerapan kebijakan Perda No.13 Tahun 2019 terkait pengelolaan sampah di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan.

### **Isi Kebijakan (*Content of Policy*)**

#### **A. Kepentingan Kelompok Sasaran**

Indikator ini mengungkapkan bahwasanya dalam pelaksanaan sebuah kebijakan pastinya melibatkan berbagai kepentingan, dan seberapa jauh kepentingan-kepentingan ini membawa pengaruh dampak implementasinya menjadi penting untuk diketahui lebih lanjut. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwasanya tujuan yang hendak diraih dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 terkait Pengelolaan Sampah ialah menciptakan masyarakat dan Kota Tangerang Selatan yang lebih baik pada pengelolaan sampah. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dalam peraturan daerah tersebut. Pencapaian tujuan ini merupakan tugas pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan pada Pasal 6, yang menyatakan bahwasanya pemerintah daerah bertugas menjalankan pengelolaan sampah dan melakukan upaya pengurangan, penanganan, serta pemanfaatan sampah sesuai dengan tujuan yang dimaksud dalam Perda Nomor 13 Tahun 2019.

## **B. Tipe Manfaat**

Indikator ini bertujuan guna menegaskan bahwasanya sebuah kebijakan diharuskan memberikan berbagai jenis manfaat yang memperlihatkan dampak positif dari implementasi kebijakan yang akan dijalankan. Temuan dari penelitian mendapatkan bahwasanya manfaat yang didapatkan oleh masyarakat diantaranya adanya kepedulian masyarakat dalam memilah dan memanfaatkan kembali sampah. Kecamatan Ciputat memiliki 59 unit Bank Sampah serta 9 unit TPS3R, adanya Bank Sampah dan TPS3R memberikan peluang usaha baru bagi masyarakat, seperti pengomposan, daur ulang, dan pembuatan kerajinan dari sampah hal ini mampu memaksimalkan pendapatan masyarakat, juga mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sebagai petugas pengumpul, pengolah, atau pemasaran produk daur ulang. Manfaat yang diperoleh pemerintah daerah pada hal ini pemerintah daerah dapat memperdayakan masyarakat di sekitaran TPS3R dan Bank Sampah

pada kegiatan yang positif seperti memilah sampah.

## **C. Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai**

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak diraih. Indikator ini ingin menegaskan bahwa derajat atau tingkat perubahan yang dikehendaki dari sebuah kebijakan harus mempunyai skala yang jelas. Temuan dari penelitian menemukan bahwasanya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 terkait Pengelolaan Sampah merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 dengan adanya tambahan poin, yaitu: mendorong dan menggugah kesadaran masyarakat dan/atau perusahaan guna mengurangi penggunaan wadah, kantong, dan/atau kemasan plastik. Sebelum adanya kebijakan Perda nomor 13 tahun 2019 masyarakat masih apatis dan tidak berkeinginan memahami tentang dampak penggunaan kantong plastik namun setelah adanya kebijakan pengelolaan sampah masyarakat mulai menerapkan untuk membatasi penggunaan jumlah wadah atau kemasan plastik hal ini

juga didukung dengan adanya Perwal nomor 83 tahun 2022 terkait pengurangan sampah plastik.

#### **D. Letak Pengambilan Keputusan**

Proses pengambilan keputusan dalam menetapkan suatu kebijakan memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, bagian ini harus menjelaskan secara rinci di mana letak pengambilan keputusan dari kebijakan yang akan diimplementasikan. Dalam penerapan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan, sasaran utamanya adalah masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam membuang sampah secara tepat.

#### **E. Pelaksanaan Program**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup selaku implementator kebijakan pengelolaan sampah telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menjalin komunikasi dengan pihak Kecamatan

Ciputat. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak pelaksana atau implementor dilakukan dengan memantau volume sampah di pasar tradisional serta Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang berada di Kecamatan Ciputat, apakah mengalami penurunan atau peningkatan. Jika setiap bulannya volume sampah terus meningkat, maka pihak implementor akan segera mencari solusi untuk mengatasinya. Selain itu, terdapat sanksi administratif bagi pelanggar dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan seperti yang telah diatur dalam Pasal 50 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, berupa teguran tertulis, paksaan pemerintahan, denda, dan pencabutan izin usaha.

#### **F. Sumber-Sumber Daya yang Digunakan**

Sumber daya manusia adalah faktor kunci dalam kesuksesan pelaksanaan kebijakan. Aspek-aspek sumber daya manusia yang dapat mendukung penerapan kebijakan meliputi keberadaan staf yang memadai, keahlian yang relevan, dan

kualifikasi yang sesuai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa staf yang terlibat dalam Bank Sampah, TPS3R, dan dinas terkait telah cukup memadai. Selain itu, sarana, prasarana, dan fasilitas di Bank Sampah atau TPS3R juga dinilai cukup baik. Berdasarkan kualitas sumber daya manusia di Bank Sampah, TPS3R dan dinas terkait sudah baik dan juga sarana prasarana sudah cukup baik.

### **Lingkungan Kebijakan (*Context of Policy*)**

#### **1. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat**

Temuan penelitian menunjukkan bahwasanya kekuasaan aktor yang terkait pada pelaksanaan pengelolaan sampah sudah cukup berjalan dengan baik dikarenakan keterlibatan masyarakat dalam mengikuti kebijakan tersebut didorong oleh sosialisasi langsung yang dilakukan oleh dinas terkait. Ini menjadi faktor pendukung penting dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 terkait Pengelolaan Sampah di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Meskipun

dorongan dari dinas terkait memiliki peran yang signifikan, kesadaran masyarakat menjadi hal yang lebih krusial.

#### **2. Karakteristik Lembaga dan penguasa**

Karakteristik lingkungan di mana sebuah kebijakan dijalankan juga membawa dampak pada keberhasilannya. Dalam penelitian yang dilakukan, tidak ditemukan hambatan internal dari para pelaksana terkait sarana beserta prasarana. Namun, hambatan eksternalnya yakni kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah, peningkatan volume sampah, serta masih sulitnya sebagian masyarakat untuk menggunakan tote bag dan menghindari kemasan plastik.

#### **3. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana**

Aspek lain yang krusial pada proses pelaksanaan sebuah kebijakan yakni tingkat kepatuhan serta respons dari para pelaksana. Poin ini bermaksud menjelaskan seberapa jauh kepatuhan dan respon pelaksana ketika menyikapi kebijakan tersebut. Hasil penelitian menemukan bahwa

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan akan memberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, paksaan pemerintahan, denda, atau pencabutan izin terhadap masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 terkait Pengelolaan Sampah. Namun, peringatan tertulis bagi warga setempat tidak diindahkan sehingga mereka terus mengulangi pelanggaran.

### **Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Perda No.13 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat ditemukan bahwa faktor pendorong dari penelitian ini adalah Tipe Manfaat, Letak Pengambilan Keputusan, Pelaksanaan Program, Sumber-sumber daya yang digunakan dan Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat. Faktor penghambat dari penelitian ini adalah Kepentingan Kelompok Sasaran, Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai, Karakteristik Lembaga dan Penguasa serta Tingkat

Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Perda No.13 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah sudah dilaksanakan cukup baik oleh pemerintah. Dampak yang dirasakan dari adanya kebijakan Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah dengan program pembatasan penggunaan plastik adalah masyarakat belum terbiasa menggunakan *totebag* dan masih menggunakan kantong plastik untuk kebutuhan sehari-hari. Badan usaha pun juga masih kesulitan untuk menerapkan pembatasan penggunaan wadah plastik dikarenakan harga *totebag* lebih mahal dari kantong plastik biasa. Masyarakat tidak ingin menggunakan *totebag* karena mereka harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli *totebag*.

### **Saran**

1. Kesadaran masyarakat yang masih rendah terkait pengelolaan sampah menjadi salah satu hambatan yang

terjadi pada pelaksanaan implementasi kebijakan. Atas dasar ini, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah daerah dapat mengatasi dengan cara menerapkan peraturan dan hukum yang tegas terkait pengelolaan sampah, seperti denda bagi pembuang sampah sembarangan dan melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten untuk memberikan efek jera. Hal ini dapat menjadi solusi agar masyarakat lebih tertib terhadap pengelolaan sampah.

2. Masih banyaknya penggunaan kantong atau wadah dari bahan plastik pastinya hal tersebut menjadi salah satu tugas pemerintah daerah untuk segera membenahi masalah tersebut. Atas dasar tersebut, pemerintah daerah wajib ber-inovasi melalui metode membagikan kantong belanja yang ramah lingkungan kepada masyarakat sekitar dengan harapan agar masyarakat mulai terbiasa menggunakan kantong belanja atau totebag dan mulai meninggalkan penggunaan kantong atau wadah plastik. Pemerintah juga bisa menjualkan kantong belanja ramah lingkungan atau totebag dengan harga

subsidi, tentunya hal ini akan mengundang minat dari masyarakat sekitar.

3. Untuk meningkatkan komunikasi, pemerintah bisa mengadakan forum diskusi dengan publik secara berkala yang melibatkan perwakilan pemerintah, LSM lingkungan, tokoh masyarakat dan warga untuk mendiskusikan permasalahan sampah beserta solusinya.
4. Disarankan pemerintah bisa melakukan razia secara rutin serta mengawasi tempat-tempat yang rawan seperti pasar tradisional, pusat perbelanjaan, hingga perkantoran untuk memastikan tidak ada peredaran dan penggunaan kantong plastik

#### Daftar Pustaka

- Mokodompis, Y., Kaunang, M., & Kasenda, V. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado. *JURNAL EKSEKUTIF*, 3(3).
- Sahupala, M. I. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya (Studi di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya). *Syntax*

- Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 5(4), 152.
- Hastuti, B. D., Anwar, F., & Titi, T. D. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan. *JIAP: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 2(2), 92-101.
- Kencana, N. (2019). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten ogan komering ulu. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 2(1).
- Wachid, A., & Caesar, D. L. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KUDUS. *J-KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(2), 173-183.
- Yudianto, T., Setyono, P., & Handayani, I. G. A. K. R. (2021). Implementasi Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 20(1), 21-26.
- Novaldi, M. F. S., Budiati, A., & Arenawati. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang. *JDKP: Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 3(2), 437-455. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v3i2.5908>
- Saepudin, A., & Kushendar, D. H. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BANDUNG (STUDI KASUS KANGPISMAN DI KELURAHAN SUKAMISKIN KECAMATAN ARCAMANIK). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1302-1309.
- Hansyar, R. M., & Halimah, H. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH DI SIGLI KABUPATEN PIDIE. *Jurnal Sains Riset*, 12(1), 59-64.
- M Aminullah, Tommy Hariyanto, Roos Widjajani (2022). Study on the Implementation of Waste Management Policies in Probolinggo Regency. *Cross Current Int J Econ Manag Media Stud*, 4(5), 72-80